

**METADATA STATISTIK
VARIABEL**

Keterangan Kegiatan Statistik		Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Batu Tahun 2023			Penyelenggara		Instansi : Pemerintah Kota Batu Unit Kerja Eselon I : Unit Kerja Eselon II : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Kerja Eselon III :	
Nama Kegiatan								
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)								

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	-	Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	Peraturan Daerah dimaksud adalah adalah Peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan oleh DPRD.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah kabupaten/kota sudah ada inisiatif penyusunan Perda melibatkan pemangku kebijakan dikabupaten/kota? 2. Apakah kebijakan/regulasi/perda PB tersebut telah didukung oleh aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan PB di daerah? 3. Apakah kebijakan/regulasi/Perda PB tersebut telah menjadi acuan dalam regulasi dan kebijakan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana? 4. Apakah kebijakan/regulasi/Perda PB tersebut telah diadopsi dalam kebijakan daerah lainnya dan selaras dan/atau diadopsi dalam kebijakan (seperti Perda RTRW, IMB, perijinan kawasan industry, dll)?	1
2	Pembentukan BPBD	-	Pembentukan BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada inisiatif untuk menyusun Perda SOTK? 2. Apakah BPBD di daerah anda telah diperkuat dalam sebuah aturan/regulasi? 3. Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di daerah? 4. Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan upaya penyelenggaraan PB di daerah?	1
3	Tentang Pembentukan Forum PRB	-	Tentang Pembentukan Forum PRB	Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah yang tidak terikat dalam bentuk regulasi, namun dapat juga dalam bentuk kesepakatan internal organisasi (statuta, AD/ART, kode etik).	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada inisiatif untuk membentuk FPRB melibatkan seluruh lapisan masyarakat? 2. Apakah telah ada diskusi-diskusi antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya) untuk menyusun aturan dan mekanisme pembentukan Forum Pengurangan Risiko bencana daerah? 3. Apakah aturan dan mekanisme yang dibuat dan disepakati tersebut digunakan dalam membentuk FPRB? 4. Apakah aturan dan mekanisme tersebut telah berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di daerah anda?	1
4	Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan	-	Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan	Informasi Kebencanaan meliputi 3 (tiga) fase bencana yaitu fase bencana, fase tanggap darurat	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang	14 bulan	Integer	1. Ya ;	Data berupa angka	1. Apakah daerah anda telah mempunyai mekanisme atau prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan? 2. Apakah mekanisme atau prosedur tersebut telah diperkuat dengan aturan daerah tentang penyebaran informasi kebencanaan?	1

4	Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan	-	Informasi Kebencanaan	yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	2. Tidak	Data berupa angka	3. Apakah mekanisme dan prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan yang di daerah anda telah terintegrasi dengan system informasi kebencanaan di tingkat nasional? 4. Apakah peran swasta dan masyarakat sudah terakomodir dalam mekanisme atau prosedur tentang penyebaran informasi kebencanaan?	1
5	Kebijakan Daerah tentang PRB	-	Kebijakan Daerah tentang PRB	Kebijakan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah berbagai kebijakan di daerah termasuk misalnya Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah daerah anda telah mempunyai Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)? 2. Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut telah diperkuat melalui regulasi Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana? 3. Apakah Rencana Penanggulangan Bencana telah memberikan peningkatan anggaran penanggulangan bencana di daerah anda? 4. Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut disusun berdasarkan hasil Pengkajian Risiko Bencana dan disusun secara partisipatif melibatkan multipihak?	1
6	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	-	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	Peraturan Daerah tentang Tataruang berbasis PRB dimaksud adalah Perda mengenai penataan ruang seperti RTRW, RDTR, dan RTBL, yang mengatur pemanfaatan ruang yang tidak memunculkan atau meningkatkan risiko bencana.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah proses penyusunan RTRW (persiapan-pengumpulan data-analisis data-konsepsi spasial) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB? 2. Apakah proses penyusunan RTRW (persiapan-pengumpulan data-analisis data-konsepsi spasial) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB? 3. Apakah aturan terkait taguana lahan dan pendirian bangunan sudah mempertimbangkan prinsip PRB? 4. Apakah ada tindakan hukum terhadap pelanggaran	1
7	Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah terbentuk BPBD di daerah Anda? 2. Apakah kelengkapan struktur di BPBD sudah terpenuhi sesuai dengan Permendagri nomor 46 tahun 2010? 3. Apakah kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baik dalam hal kualitas atau kuantitasnya? 4. Apakah BPBD telah berfungsi secara efektif dalam mengoordinasikan, memberi komando, para OPD terkait dalam penyelenggaraan PB?	1
8	Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana	-	Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana	Lembaga forum PRB yang dimaksud adalah forum yang telah memiliki landasan hukum (legal entity) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan dari multi pihak dalam upaya PRB.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada forum yang terdiri dari berbagai komponen/ kelompok (baik pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, kelompok agama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah? 2. Apakah forum pengurangan risiko bencana (FPRB) telah memiliki dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB? 3. Apakah FPRB telah memiliki mekanisme organisasi sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB? 4. Apakah FPRB di daerah anda telah menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan forum melalui program kerja yang didukung oleh pendanaan yang jelas?	1
9	Komitmen DPRD terhadap PRB	-	Komitmen DPRD terhadap PRB	Komitmen dimaksud adalah keterlibatan aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap seluruh aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah ada keterlibatan kelembagaan DPRD dalam kegiatan terkait PRB atau apakah DPRD mengakomodasi usulan kegiatan terkait dengan PRB? 2. Apakah ada respon positif dari DPRD dalam pembahasan anggaran terkait PRB di daerah? 3. Apakah DPRD menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana? 4. Apakah DPRD menggunakan Dana Aspirasi untuk kegiatan terkait PRB?	1
										1. Apakah daerah anda telah memiliki data dan informasi yang mencukupi tentang karakteristik ancaman bencana yang ada di wilayah anda? 2. Apakah data dan informasi tentang karakteristik	

10	Peta Bahaya dan Kajiannya untuk Seluruh Bahaya yang Ada di Daerah	-	Peta Bahaya dan Kajiannya untuk Seluruh Bahaya yang Ada di Daerah	Pada indikator 10 ini pertanyaan kunci difokuskan pada ketersediaan peta bahaya dan kajiannya di daerah.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah data dan informasi tentang ancaman bencana telah tersedia dalam bentuk peta bahaya dan kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya? 3. Apakah peta bahaya yang dimiliki telah digunakan untuk menyusun kajian risiko bencana yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana? 4. Apakah Kajian ancaman bencana jenis hidrometeorologis (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan) telah mempertimbangkan komponen, perubahan-perubahan variabelbas iklim dan scenario iklim dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Kajian Risiko di daerah Anda?	1
11	Peta Kerentanan dan Kajiannya untuk Seluruh Bahaya yang Ada di Daerah	-	Peta Kerentanan dan Kajiannya untuk Seluruh Bahaya yang Ada di Daerah	Pada indikator 11 ini pertanyaan kunci difokuskan pada ketersediaan peta kerentanan dan kajiannya di daerah.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah daerah anda telah memiliki data dan informasi yang mencukupi tentang karakteristik kerentanan dari ancaman bencana yang ada di wilayah anda? 2. Apakah data dan informasi yang tersedia telah dibuat dalam bentuk peta kerentanan yang mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana yang ada di daerah anda? 3. Apakah dokumen kajian dan peta kerentanan dari setiap ancaman bencana menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah anda? 4. Apakah kajian kerentanan dan peta kerentanan yang ada telah serta rekomendasi yang dihasilkan telah menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah anda?	1
12	Peta Kapasitas dan Kajiannya	-	Peta Kapasitas dan Kajiannya	Pada indikator 12 ini pertanyaan kunci difokuskan pada ketersediaan peta kapasitas dan kajiannya di daerah.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah tersedia data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui tingkat kapasitas dari tiap-tiap ancaman bencana yang ada di daerah anda? 2. Apakah data dan informasi tersebut telah tersedia dalam bentuk peta kapasitas yang mampu menggambarkan kemampuan daerah anda terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada? 3. Apakah dokumen dan peta kapasitas telah dianalisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana? 4. Apakah kajian risiko bencana (dokumen kajian dan peta risiko bencana) telah mempertingkan analisis dampak perubahan iklim dan menjadi dasar/acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana?	1
13	Rencana Penanggulangan Bencana	-	Rencana Penanggulangan Bencana	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dimaksud adalah Rencana Induk Penanggulangan Bencana di Daerah yang merupakan Dokumen Daerah dan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah. RPB disusun untuk multi ancaman bencana di daerah yang mencakup tahapan PB (Pra, Saat, Pasca).	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah daerah anda telah memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hasil Pengkajian Risiko Bencana di daerah anda? 2. Apakah proses penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah melibatkan dan mengakomodir lintas OPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah? 3. Apakah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tersebut telah ditetapkan dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya? 4. Apakah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah menjadi acuan bagi satuan kerja pemerintah daerah (OPD) terkait dalam penyusunan perencanaan serta mendapat dukungan legislatif?	1
14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	-	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	Informasi apapun terkait kebencanaan yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut harus didiseminasikan secara menyeluruh dan menjangkau semua lapisan masyarakat.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah tersedia pengaturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan ke masyarakat? 2. Apakah data – data yang ada diolah sebagai informasi dan informasi bencana yang diperbarui secara periodik dari sumber informasi tersebut? 3. Apakah informasi kebencanaan yang sudah diolah telah menjadi dasar untuk pengambilan	1

										keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder? 4. Apakah informasi kejadian bencana tersebut sudah dapat terintegrasi antar sector dan sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk scenario operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi?	
15	Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap Kecamatan di wilayahnya	-	Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap Kecamatan di wilayahnya	Terselenggaranya kegiatan rutin sosialisasi di setiap kecamatan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan rutin ini dapat berbentuk aktivitas komunitas, kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi tertentu, dan lain-lain. Kegiatan dilakukan secara rutin dimaksudkan untuk menjaga pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang senantiasa bersifat dinamis.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah ada kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayah anda? 2. Apakah kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dilakukan secara rutin dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan isi materi yang terstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman di daerah Anda? 3. Apakah masyarakat sudah berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri? 4. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat sudah mampu mengimplementasikan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, misalnya rencana evakuasi, EWS?	1
16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.	-	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.	Terselenggaranya mekanisme komunikasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana. Pengurangan Risiko Bencana secara baik disadari oleh instansi-instansi teknis dan pada pembangunan.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah ada mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan? 2. Apakah mekanisme tersebut didukung dengan aturan dan sumberdaya yang memadai? 3. Apakah hasil dari mekanisme bersama tersebut sudah saling memanfaatkan pada masing – masing stakeholder? 4. Apakah mekanisme bersama tersebut sudah dapat menghasilkan program bersama secara terstruktur dan berkelanjutan?	1
17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	-	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	Pusdalops PB memberikan informasi-informasi penting untuk menggerakkan masyarakat dalam menyelamatkan diri saat kejadian bencana. Proses ini melalui upaya peringatan dini.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah anda? 2. Apakah pusdalops sudah didukung peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis? 3. Apakah pusdalops sudah efektif menjalankan fungsi dalam penanganan masa krisis di daerah Anda? 4. Apakah efektivitas yang dimiliki Pusdalops ataupun SKTD di atas dapat dijadikan acuan untuk perencanaan tanggap darurat selanjutnya?	1
18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	-	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	Tersedianya sebuah system pendataan terkait kebencanaan di daerah yang terintegrasi secara vertikal dan dimanfaatkan di kedua arah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Sistem pendataan yang dimaksud telah menjadi standar nasional dan daerah.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional? 2. Apakah system pendataan di tingkat nasional dan di tingkat daerah dapat saling memanfaatkan? 3. Apakah system pendataan nasional yang terintegrasi dengan system di daerah ikut membangun rencana scenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah? 4. Apakah system pendataan nasional yang terintegrasi dengan system di daerah tersebut dimanfaatkan di daerah untuk mendukung perencanaan, pembuatan keputusan, serta program/kegiatan di daerah Anda?	1
19				Tersedianya actor pengguna peralatan PB yang	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun					1. Apakah telah dilakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/ berkala (minimal 2 kali dalam setahun) di daerah anda? 2. Apakah hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB telah diuji coba dalam sebuah latihan kepiapsiagaan (drill) simulasi melalui resiko maupun	1

	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	-	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	tersertifikasi sebagai actor kunci dalam respons kejadian bencana di daerah. Peralatan PB yang dimaksud mengacu kepada lampiran Perka BNPB 11/2011 tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan PB.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan di daerah anda? 2. Apakah penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut telah dilakukan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem)? 3. Apakah dengan sertifikasi penggunaan peralatan PB tersebut, personil dapat merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)? 4. Apakah sumberdaya yang telah tersertifikasi dipercaya sebagai pemangku kepentingan kunci dalam respons kejadian bencana?	
20	Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan	-	Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan	Terdapat latihan (geladi) kesiapsiagaan.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan di daerah anda? 2. Apakah penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut telah dilakukan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem)? 3. Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan sadar pentingnya dan merasa aman dengan adanya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut? 4. Apakah Latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut telah dapat meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana?	1
21	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	-	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat bencana disesuaikan dengan perhitungan jumlah jiwa terdampak pada daerah rawan bencana.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah dilakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah anda? 2. Apakah kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut dilakukan berdasarkan Rencana Kontingensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas di daerah anda? 3. Apakah hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut telah diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Daerah di daerah anda? 4. Apakah hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah memiliki dampak terhadap peningkatan alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah anda?	1
22	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	-	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan, pemerintah melakukan pengadaan kebutuhan tersebut.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang menangani (mengusulkan dan atau melaksanakan) peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana? 2. Apakah pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, sebagaimana dijelaskan pada indikator 21 ? 3. Apakah pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi di daerah anda telah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian? 4. Apakah peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi di daerah anda telah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana?	1
23	Penyimpanan/peredagangan Logistik PB	-	Penyimpanan/peredagangan Logistik PB	Proses penyimpanan dan peredaran dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit peredaran dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu (Perka BNPB No.13 tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan PB)	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada tempat penyimpanan/peredaran logistik di daerah anda? 2. Apakah tempat penyimpanan/peredaran logistik tersebut berada dibawah lembaga teknis tertentu di pemerintahan untuk penanganan darurat bencana? 3. Apakah penyimpanan/peredaran logistik PB yang ada mampu dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya? 4. Menurut anda, apakah kebutuhan tempat penyimpanan/peredaran logistik di daerah anda telah terpenuhi dengan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya?	1
										1. Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang	

24	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	-	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	Supply Chain adalah jaringan kerja yang terintegrasi dengan baik, dari fasilitas-fasilitas (gudang,pabrik, terminal, pelabuhan, toko, dan rumah), kendaraan (truk, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut), dan sistem informasi logistik yang dihubungkan dengan suppliernya suplier dan konsumen akhir. Logistik adalah kejadian dalam supply chain.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<p>menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik?</p> <p>2. Apakah lembaga tersebut memiliki kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah anda?</p> <p>3. Apakah pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi berjalan efektif?</p> <p>4. Menurut anda, apakah pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik di daerah anda telah terpenuhi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya?</p>	1
25	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	-	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	Pemerintah daerah dapat menjamin keberlangsungan pasokan energy listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah, yang mengacu kepada scenario dalam Rencana Kontijensi	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<p>1. Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana?</p> <p>2. Apakah lembaga tersebut telah memiliki mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah anda?</p> <p>3. Apakah strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat telah mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi?</p> <p>4. Adakah jaminan keberlangsungan dan/atau pemulihan pasokan listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah di daerah?</p>	1
26	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	-	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	Pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terparah dan dievaluasi secara berkala	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<p>1. Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana?</p> <p>2. Apakah terdapat strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah telah mempertimbangkan skenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan scenario bencana jangka panjang (slow onset) di daerah?</p> <p>3. Apakah strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta)?</p> <p>4. Adakah jaminan ketahanan pangan untuk kebutuhan darurat bencana terparah maupun risiko bencana jangka panjang (slow onset) di daerah?</p>	1
27	Penataan ruang berbasis PRB	-	Penataan ruang berbasis PRB	Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<p>1. Apakah pemerintah kota/kab telah melakukan inisiatif penyusunan tata ruang kab/kota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana?</p> <p>2. Apakah pemerintah kota/kab telah melakukan inisiatif pengkajian kembali tata ruang kab/kota dalam rangka penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif?</p> <p>3. Apakah telah ada RTRW Kota/ Kabupaten Revisi yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/manajemen risiko bencana?</p> <p>4. Apakah struktur ruang (pemukiman dan jaringan prasarana) dan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah dimanfaatkan untuk mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas kota/kab. dalam penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana?</p>	1
				Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun					<p>1. Apakah telah ada lembaga pemerintah yang menangani informasi penataan ruang di daerah anda?</p> <p>2. Apakah telah ada informasi penataan ruang yang</p>	

28	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	-	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	Pada indikator ini tocius kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.	2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	Mudah diakses publik? 3. Apakah publik telah memanfaatkan informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana? 4. Apakah publik telah menerapkan penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana?	1
29	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	-	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana adalah Sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh sekolah/madrasah ditingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana tentang hasil/ manfaat/ tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)? 2. Apakah 75% dari total jumlah sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana sudah pernah melaksanakan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana? 3. Apakah pelaksanaan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana? (50% dari 75% dari sekolah/madrasah yang pernah disosialisasikan) 4. Apakah pelaksanaan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman yang fokus pada 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) di seluruh sekolah/madrasah aman bencana yang ada di kawasan rawan bencana sudah dilakukan secara komprehensif?	1
30	Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana	-	Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana	Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan yang efisien setiap waktu, bahkan setelah bencana terjadi atau pada masa tanggap darurat, tangguh dan terorganisir dengan tersedianya rencana kontijensi di rumah sakit dan puskesmas tersebut serta memiliki tenaga kerja yang terlatih untuk memastikan bahwa rumah sakit tersebut tetap bisa menjalankan fungsinya pada saat krisis. Secara struktur bangunan, tahan menghadapi ancaman bahaya bencana dan tidak akan rusak berat ataupun rubuh jika ada kejadian ekstrem menguncangnya, yang dapat mengakibatkan pasien dan staf rumah sakit mengalami luka/cedera.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sosialisasi rumah sakit dan puskesmas aman bencana sudah dilakukan di daerah rawan bencana? 2. Apakah seluruh rumah sakit daerah rawan bencana perencanaan kegiatan/program rumah sakit aman bencana sudah berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana)? 3. Apakah seluruh rumah sakit daerah rawan bencana sudah melaksanakan kegiatan/program rumah sakit aman bencana berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana)? 4. Apakah seluruh rumah sakit di kawasan rawan bencana telah melakukan sertifikasi / evaluasi aspek safety hospital yang berkaitan dengan pemenuhan syarat akreditasi rumah sakit?	1
31	Desa Tangguh Bencana	-	Desa Tangguh Bencana		Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan kepada komunitas-komunitas masyarakat di daerah anda? 2. Apakah telah ada dilakukan peningkatan kapasitas kelurahan/desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana? 3. Apakah telah desa tangguh bencana tersebut telah melakukan simulasi dan apakah penerapan indikator destanan tersebut berkontribusi pada pembangunan desa berawawasan PRB? 4. Apakah Desa Tangguh bencana tersebut telah mampu menginspirasi dan membantu pembangunan Desa Tangguh bencana di tempat lain?	1
					Peraturan Daerah Kota					1. Apakah di pemerintah maupun di komunitas Anda telah ada kebijakan tentang lingkungan hidup (resapan air)? 2. Apakah telah ada penerapan resapan air dalam	

32	Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir	-	Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir	Biopori/Sumur resapan adalah salah satu metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.	Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	upaya pengurangan risiko bencana banjir? 3. Apakah Penerapan resapan air di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir? 4. Apakah Penerapan resapan air di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?	1
33	Perlindungan daerah tangkapan air	-	Perlindungan daerah tangkapan air	Daerah tangkapan air merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis yang dapat berupa punggung-punggungan bukit atau gunung dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah di pemerintah maupun komunitas Anda telah ada kebijakan tentang lingkungan hidup (daerah tangkapan air)? 2. Apakah telah ada perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir? 3. Apakah perlindungan daerah tangkapan air di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir? 4. Apakah perlindungan daerah tangkapan air di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?	1
34	Restorasi Sungai	-	Restorasi Sungai	Restorasi sungai adalah mengembalikan fungsi alami/renaturalisasi sungai, yang telah terdegradasi oleh intervensi manusia. Restorasi sungai merupakan perubahan paradigma dalam ilmu rekayasa sungai (river engineering) yaitu perubahan dari pola penyelesaian berdasarkan aspek teknik sipil hidro secara parsial menjadi penyelesaian terintegrasi aspek hidraulik, fisik, ekologi, sosial.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah di pemerintah maupun komunitas Anda telah ada kebijakan tentang lingkungan hidup? 2. Apakah telah upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir? 3. Apakah upaya restorasi sungai di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir? 4. Apakah upaya restorasi sungai di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?	1
35	Penguatan Lereng	-	Penguatan Lereng	Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masabatuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Salah satu penanganannya adalah dengan penguatan lereng. Pada indikator 35 ini pertanyaan kunci difokuskan pada kebijakan tentang upaya pengur+P39angan risiko bencana Tanah Longsor dengan melakukan penguatan lereng.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah di pemerintah maupun komunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (kawasan DAS Rawan Longsor)? 2. Apakah telah ada upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor? 3. Apakah upaya penguatan lereng di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor? 4. Apakah upaya penguatan lereng di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor?	1
36	Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	-	Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	Gambut diartikan sebagai tanah lunak dan basah, terdiri atas lumut dan bahan tanaman lain yang membusuk (biasanya terbentuk di daerah rawa atau di danau yang dangkal). Lahan Gambut adalah bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anaerobik. Pada musim kemarau lahan gambut ini berpotensi menimbulkan kebakaran lahan.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada Peraturan Daerah/Peraturan Adat atau desa dalam Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan? 2. Apakah telah ada penegakan hukum bagi Masyarakat, Swasta, dan Instansi yang melanggar perda tersebut? 3. Apakah peraturan daerah sudah di implementasikan pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar? 4. Apakah dengan adanya peraturan dan penegakan hukum dapat mengurangi titik panas (hotspot) dan indeks kebakaran hutan dan gambut di banding dengan tahun sebelumnya?	1
37	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	-	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	<input type="checkbox"/> Sistem pengelolaan atau perlindungan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan lahan pertanian <input type="checkbox"/> Pengelolaan dan perlindungan Air permukaan (sungai, mata air, rawa-rawa, danau, lahan basah, embung, irigasi) dan DTA. Melindungi daerah tangkapan air (DTA) secara luasan dan kualitas tulupan lahan DTA, revalidasi embung untuk cadangan air, kawasan hutan lindung kota/kab, Restorasi sungai. <input type="checkbox"/> Adanya inisiatif pencegahan struktural bencana banjir melalui perlindungan daerah tangkapan air (ruang terbuka hijau, taman kota, dan pemeliharaan kawasan lindung seperti sempadan DAS/Sub DAS/danau/mata air/dli) dan perkuatan lereng di kota/kab	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah ada inisiatif-inisiatif di tingkat daerah yang memada dalam Pengelola air permukaan (perlindungan, Pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan? 2. Apakah sudah ada peraturan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan? 3. Apakah telah ada program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan? 4. Apakah program optimalisasi program pengelolaan air telah mengurangi risiko bencana kekeringan?	1

38	Pemantauan berkala hulu sungai	-	Pemantauan berkala hulu sungai	Sistem pengelolaan dan pemantauan area DAS hulu sungai (sempadan, badan air, dan area hutan diluar sempadan mencakup perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) yang inklusif (multidisiplin dan multipihak) dan lintas administratif kota/kab di landscape DAS yang sama) untuk mencegah dan memitigasi bencana banjir bandang.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah ada inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab)? 2. Apakah ada kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab)? 3. Apakah ada kebijakan kerjasama paripihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap? 4. Apakah implementasinya mengurangi risiko bencana banjir bandang?	1
39	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi	-	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi	Bangunan tahan gempa bukan berarti "anti gempa". Suatu bangunan, sekuat apapun, saat terjadi gempa pasti akan terkena getarannya. Namun yang membedakan ketika suatu bangunan terkena getaran dari dampak kejadian gempa adalah bangunan tersebut tetap aman atau tidak.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada kebijakan bangunan tahan gempabumi di daerah anda? 2. Apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan dalam perjanjian mendirikan bangunan (IMB) daerah anda? 3. Apakah telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB? 4. Apakah ada tindakan hukum terhadap pelanggaran penerapan IMB?	1
40	Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	-	Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Ada beberapa jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai penahan gelombang tsunami. Misalnya, pohon kelapa, mangrove, casuarina. Selain itu dapat juga berupa bangunan untuk penahan gelombang tsunami seperti tembok atau bangunan lainnya.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural (tanaman dan/atau bangunan) penahan gelombang tsunami di daerah rawan tsunami? 2. Apakah ada regulasi (kebijakan dan peraturan kota/kab) yang mendukung inisiatif tersebut? 3. Apakah penerapan mitigasi tersebut sudah meliputi seluruh daerah berisiko tinggi terhadap tsunami? 4. Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas penahan gelombang tsunami (tanaman dan/atau bangunan) secara berkala?	1
41	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	-	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	Revitalisasi adalah suatu upaya atau proses dalam rangka mengembalikan fungsi objek-objek yang penting dalam rangka melaksanakan kegiatan mitigasi struktural untuk bencana banjir. Objek-objek yang dapat direvitalisasi contohnya tanggul, embung, waduk, dan taman kota.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah anda? 2. Apakah telah ada kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah anda? 3. Apakah telah dilakukan upaya mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) di daerah anda? 4. Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim?	1
42	Restorasi lahan gambut	-	Restorasi lahan gambut	Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. Restorasi lahan gambut maksudnya adalah mengembalikan kondisi lahan gambut seperti semula agar dapat mengurangi emisi yang disebabkan pelepasan karbon yang besar.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut di daerah anda? 2. Apakah inisiatif pengelolaan dan restorasi lahan gambut telah dilaksanakan bersama antara pemerintah dan swasta? 3. Apakah telah ada kebijakan tentang restorasi lahan gambut di daerah anda? 4. Apakah telah ada program dan kegiatan restorasi lahan gambut?	1
43	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	-	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, pelestarian. Konservasi vegetatif DAS maksudnya pelestarian vegetasi-vegetasi yang ada di sekitar DAS	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor daerah anda? 2. Apakah telah ada kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor daerah anda? 3. Apakah telah ada program dan kegiatan konservasi	1

				dalam upaya mitigasi struktural bencana longsor.	Bencana					vegetatif di wilayah DAS yang rawan longsor secara berkelanjutan? 4. Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS?	
44	Rencana Kontijensi Gempabumi	-	Rencana Kontijensi Gempabumi	Skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Rencana yang disusun untuk menghadapi suatu situasi krisis yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi dapat pula tidak terjadi. Renkon tidak dimaksudkan untuk menyusun suatu proyek, melainkan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumberdaya/potensi masyarakat yang tersedia untuk menghadapi bencana/ke daruratan.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana gempabumi di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai petingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya) 2. Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gempabumi? 3. Apakah Rencana kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap darurat bencana gempabumi? 4. Apakah Rencana Kontijensi Gempabumi ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?	1
45	Rencana Kontijensi Tsunami	-	Rencana Kontijensi Tsunami	Indikator 45 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana Tsunami.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Tsunami di daerah anda? 2. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda? 3. Apakah sistem peringatan dini yang dibangun dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tsunami? 4. Apakah sistem peringatan ini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Tsunami?	1
46	Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	-	Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	Pada indikator 46 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Tsunami di daerah anda? 2. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda? 3. Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Tsunami? 4. Apakah sistem peringatan dini ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat (dan investor) dari ancaman tsunami?	1
47	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	-	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	Pada indikator 47 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Rencana Evakuasi Tsunami berdasarkan kajian risiko bencana	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah ada inisiatif rencana evakuasi bencana tsunami yang disusun berdasarkan Kajian risiko dan memperhitungkan aksesibilitas pengungsi? 2. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system rencana evakuasi secara berkala (minimal 1 tahun sekali) oleh multi stakeholder? 3. Apakah masyarakat mampu memperbaharui rencana evakuasi tersebut secara mandiri dan berkala? 4. Apakah seluruh masyarakat di daerah rawan bencana tsunami mampu menerapkan rencana evakuasi tersebut?	1
48	Rencana Kontijensi Banjir	-	Rencana Kontijensi Banjir	Indikator 48 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana banjir.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Banjir di daerah anda? 2. Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir? 3. Apakah Rencana kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap darurat bencana Banjir? 4. Apakah Rencana Kontijensi Banjir ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?	1

49	Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir	-	Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir	Pada indikator 49 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun, baik berupa alat sederhana berbasis komunitas, system peringatan beralur, sampai alat peringatan dini yang canggih.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Banjir di daerah anda? 2. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda? 3. Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir? 4. Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat (dan investor) dari ancaman Banjir? 	1
50	Rencana Kontijensi Tanah Longsor	-	Rencana Kontijensi Tanah Longsor	Indikator 50 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana tanah longsor.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana tanah longsor di daerah anda? 2. Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor? 3. Apakah Rencana kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat bencana Tanah Longsor? 4. Apakah Rencana Kontijensi Tanah longsor ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda? 	1
51	Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor	-	Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor	Pada indikator 51 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Tanah Longsor di daerah anda? 2. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda? 3. Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Tanah Longsor? 4. Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Tanah Longsor? 	1
52	Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan	-	Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan	Indikator 52 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana Kebakaran Lahan dan Hutan.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah anda? 2. Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan? 3. Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah diujicoba, dievaluasi, dan terbukti mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan? 4. Apakah Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda? 	1
53	Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Pada indikator 53 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah anda? 2. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda? 3. Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan? 4. Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Kebakaran hutan dan Lahan? 	1
										1. Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana	

54	Rencana Kontijensi Erupsi Gunungapi.	-	Rencana Kontijensi Erupsi Gunungapi.	Indikator 54 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana Erupsi Gunungapi.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	kontijensi untuk bencana Erupsi Gunungapi di daerah anda? 2. Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Erupsi Gunungapi? 3. Apakah Rencana kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap darurat bencana Erupsi Gunungapi? 4. Apakah Rencana Kontijensi erupsi Gunungapi ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?	1
55	Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunungapi	-	Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunungapi	Pada indikator 55 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Erupsi Gunungapi di daerah anda? 2. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda? 3. Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Erupsi Gunungapi? 4. Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat (dan investor) dari ancaman Erupsi Gunungapi?	1
56	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi Gunungapi	-	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi Gunungapi	Pada indikator 56 ini pertanyaan kunci difokuskan pada pembuatan Infrastruktur evakuasi bencana Gunungapi berdasarkan Kajian Risiko Bencana.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah daerah anda telah memiliki infrastruktur evakuasi, setidaknya inisiatif pembangunan infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana erupsi gunungapi yang disusun berdasarkan pengkajian risiko bencana erupsi gunungapi? 2. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system rencana evakuasi bencana erupsi gunungapi secara berkala oleh multi stakeholder? 3. Apakah seluruh masyarakat telah memahami system dan infastuktur evakuasi gunungapi dengan baik sehingga bisa diterapkan jika bencana erupsi gunungapi terjadi? 4. Apakah masyarakat telah merasakan manfaat dengan adanya rambu peringatan dan/atau rambu evakuasi bencana erupsi gunungapi di daerah anda?	1
57	Rencana Kontijensi Kekeringan	-	Rencana Kontijensi Kekeringan	Indikator 57 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana kekeringan.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana kekeringan di daerah anda? 2. Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana kekeringan? 3. Apakah Rencana kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa Tanggap Darurat bencana Kekeringan? 4. Apakah Rencana Kontijensi kekeringan ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?	1
58	Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan	-	Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan	Pada indikator 58 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Kekeringan di daerah anda? 2. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda? 3. Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kekeringan? 4. Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman dunia usaha dari ancaman Kekeringan?	1

1. Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana

59	Rencana Kontijensi Banjir Bandang	-	Rencana Kontijensi Banjir Bandang	Indikator 59 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana banjir bandang.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	kontijensi untuk bencana Banjir Bandang di daerah anda? 2. Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang? 3. Apakah Rencana kontijensi yang telah diujicoba, dievaluasi, dan terbukti mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang? 4. Apakah Rencana Kontijensi Banjir Bandang ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah anda?	1
60	Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang	-	Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang	Pada indikator 60 ini pertanyaan kunci difokuskan pada Sistem Peringatan Dini yang disusun, baik berupa alat sederhana berbasis komunitas, system peringatan beralur, sampai alat peringatan dini yang canggih.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah sudah ada inisiatif untuk membangun system peringatan dini Banjir Bandang di daerah anda? 2. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji system dan prosedur peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda? 3. Apakah system peringatan dini yang dibangun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Banjir Bandang? 4. Apakah system peringatan ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat (dan investor) dari ancaman Banjir Bandang?	1
61	Penentuan Status Tanggap Darurat	-	Penentuan Status Tanggap Darurat	Indikator 61 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara penentuan Status Tanggap Darurat yang sesuai dengan SOP dan Perka BNPB.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah anda? 2. Apakah mekanisme dan prosedur tersebut telah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis tentang penentuan status tanggap darurat di daerah anda? 3. Apakah mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya? 4. Apakah penentuan status tanggap darurat tersebut mempengaruhi kebijakan penganggaran OPD (di luar BPBD) terkait penanggulangan bencana?	1
62	Penerapan Sistem Komando operasi darurat	-	Penerapan Sistem Komando operasi darurat	Indikator 62 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat. Sistem Komando Operasi Darurat adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk mensinergikan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun dana atau anggaran.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di daerah anda? 2. Apakah mekanisme dan prosedur tersebut telah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis tentang sistem komando tanggap darurat di daerah anda? 3. Apakah sistem komando tanggap darurat tersebut dipahami oleh seluruh OPD sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari? 4. Apakah sistem dan prosedur sistem komando tanggap darurat bencana tersebut dirasakan efektif oleh para pemangku kepentingan dalam situasi tanggap darurat bencana?	1
63	pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana	-	pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana	Indikator 63 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis? 2. Apakah telah ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis? 3. Apakah relawan dan personil terlatih tersebut melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur berlaku? 4. Apakah hasil kaji cepat tersebut dijadikan acuan dalam penentuan status tanggap darurat?	1
			Pengerahan Tim	Indikator 64 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang					1. Apakah telah ada relawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana? 2. Apakah telah ada prosedur pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana?	

64	Pengeralahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	-	Penyelamatan dan Pertolongan Korban	yang menitikberatkan pada cara Pengeralahan Tim Kaji Penyelamatan dan Pertolongan Korban	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	3. Apakah tim penyelamatan dan pertolongan korban tersebut melakukan tugasnya sesuai prosedur berlaku? 4. Apakah tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban melaksanakan tugasnya secara efektif?	1
65	Perbaikan Darurat	-	Perbaikan Darurat	Perbaikan darurat yang dimaksud adalah perbaikan darurat untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana. Fasilitas kritis termasuk diantaranya Listrik, Air Bersih, Sistem Transportasi, Rumah Sakit, Polisi, Komunikasi, dan Fasilitas Tanggap Darurat Lainnya.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa krisis dan tanggap darurat bencana? 2. Apakah prosedur tersebut telah diperkuat melalui sebuah aturan daerah? 3. Apakah pada prosedur tersebut telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat? 4. Apakah prosedur perbaikan darurat bencana tersebut dapat memulihkan fungsi fasilitas kritis dengan segera pada masa tanggap darurat?	1
66	Pengeralahan Bantuan pada masyarakat terjauh	-	Pengeralahan Bantuan pada masyarakat terjauh	Indikator 66 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara Pengeralahan bantuan pada masyarakat terjauh.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat yang sulit dijangkau pada masa krisis dan tanggap darurat bencana? 2. Apakah telah ada mekanisme dan prosedur untuk pendistribusian bantuan darurat bencana? 3. Apakah relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur? 4. Apakah prosedur pendistribusian bantuan kemanusiaan tersebut mampu menjangkau masyarakat terjauh?	1
67	Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana	-	Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana	Indikator 67 ini terdiri dari beberapa pertanyaan kunci yang menitikberatkan pada cara Penghentian status Tanggap Darurat Bencana.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada aturan tertulis tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana? 2. Apakah prosedur tersebut telah mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi? 3. Apakah penentuan status tanggap darurat tersebut dipercaya masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat? 4. Apakah prosedur penghentian status tanggap darurat mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat?	1
68	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	-	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	Pada indikator 68 ini pertanyaan kunci difokuskan pada aksi pemerintah maupun komunitas di daerah tentang ketersediaannya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pada saat pasca bencana untuk setiap ancaman bencana.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada inisiatif untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah? 2. Apakah mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah tersebut telah secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah? 3. Apakah rencana tersebut telah mengakomodir seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi? 4. Adakah jaminan kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana?	1
69	Pemulihan Infrastruktur Penting	-	Pemulihan Infrastruktur Penting	Pada indikator 69 ini pertanyaan kunci difokuskan pada pentingnya segera dilakukannya pemulihan infrastruktur (misalnya dalam jangka waktu 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	1. Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana? 2. Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban? 3. Apakah rancangan proses – proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan? 4. Adakah jaminan keberlangsungan fungsi infrastruktur penting pasca bencana di daerah?	1

1. Apakah telah ada sistem atau mekanisme daerah

70	Perbaikan rumah penduduk	-	Perbaikan rumah penduduk	Pada indikator 70 ini pertanyaan kunci difokuskan pada perbaikan rumah penduduk agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik (build back better) dan dijalankan secara swadaya maupun atas dukungan pemerintah maupun pihak lain secara sistematis	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<p>1. Apakah telah ada sistem atau mekanisme ueteran untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana?</p> <p>2. Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban?</p> <p>3. Apakah rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan?</p> <p>4. Apakah perbaikan rumah penduduk yang telah/sedang dilaksanakan telah mampu secara terukur mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang telah terjadi?</p>	1
71	Pemulihan Penghidupan Masyarakat	-	Pemulihan Penghidupan Masyarakat	Pada indikator 71 ini pertanyaan kunci difokuskan pada pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan risiko di masa depan.	Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14 bulan	Integer	1. Ya ; 2. Tidak	Data berupa angka	<p>1. Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana?</p> <p>2. Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban?</p> <p>3. Apakah pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat?</p> <p>4. Apakah proses pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana telah membangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan aset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas?</p>	1

Batu _____, _____ 2023
Mengetahui,
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NIP. _____